



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SIGIT SUNARTA**
2. Jabatan : **DEKAN**
3. NHK : **814343**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 2.200.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 209 m2/180 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 97 m2/72 m2 di KAB / KOTA BANTUL, WARISAN Rp. 350.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/80 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 707.000.000

1. MOTOR, VARIO SCOOTER Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
4. MOTOR, KAWASAKI SEPEDA MOTOR SPORT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ---

D. SURAT BERHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 200.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 3.107.000.000

III. HUTANG

Rp. 170.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.937.000.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.